



**H. BAMBANG PU DJIONO, SH
BUPATI GROBOGAN**



**H. ICEK BASKORO, SH
WAKIL BUPATI GROBOGAN**

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2011**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 27 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai perwujudan atas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan otonomi daerah, serta untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) kepada Pemerintah, LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) kepada DPRD, serta Informasi LPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) disampaikan kepada masyarakat.

Informasi LPPD yang disampaikan kepada masyarakat merupakan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang memuat :

1. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
3. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Penyusunan Informasi LPPD ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2011, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan dan/atau saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2011 dimaksud.

Tanggapan dan/atau saran dari masyarakat oleh pemerintah daerah selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan program kerja dan/atau peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. Tanggapan dan/atau saran itu disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah informasi LPPD disampaikan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.
3. PERMENDAGRI Nomor 7A Tahun 2007 dan Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Surat MENDAGRI tanggal 8 Mei 2007 Nomor 188.32.04/558-DV perihal PERMENDAGRI Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Grobogan secara geografis terletak di antara $110^{\circ}15'$ BT – $111^{\circ}25'$ BT dan 7° LS - $7^{\circ}30'$ LS. Dengan kondisi tanah, sebagian berupa daerah pengunungan kapur dan perbukitan, serta di bagian tengah berupa dataran. Terletak di antara 2 (dua) pegunungan yaitu Kendeng Utara dan Selatan. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Demak, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kudus, Pati dan Blora, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blora dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Sragen, Semarang dan Kabupaten Ngawi.

Luas wilayah Kabupaten Grobogan $1.975,865 \text{ km}^2$. Secara administrasi terdiri dari 19 Kecamatan dan 280 Desa/Kelurahan. Perkembangan Penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan sampai akhir tahun 2011 mencapai 1.421.609 jiwa, atau bertambah 8.273 jiwa dari tahun 2010. Namun jika dicermati dari angka Laju Pertumbuhan penduduk, Pemerintah Daerah telah dapat menekan laju pertumbuhan sebesar 0,03% dari tahun sebelumnya, yaitu dari 0,61% menjadi 0,58%.

Sedangkan **Kepadatan Penduduk** cenderung meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data tahun 2008 sampai tahun 2011, kepadatan penduduk mengalami peningkatan sebesar 13 jiwa/km^2 , yaitu dari 706 jiwa/km^2 menjadi 719 jiwa/km^2 .

Mengenai **Dependency Ratio** atau angka ketergantungan penduduk, pada tahun 2011 diperoleh angka sebesar 51, yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk usia produktif menanggung 51 jiwa penduduk yang tidak produktif. Angka ketergantungan sebesar 51 ini, masih dikategorikan dalam ketergantungan sedang.

Adapun gambaran **Kondisi Pendidikan penduduk** pada tahun 2011, tertinggi ditempati oleh tamatan SD atau sederajat sebanyak 39%, kemudian secara berurutan diikuti kategori tidak atau belum pernah sekolah dan tidak atau belum

tamat SD sebanyak 33%, SLTP atau sederajat 17%, tamatan SMU atau sederajat 9%, dan terakhir Akademi/Diploma, S1, S2, dan S3 sebanyak 2%.

Untuk **Kondisi Ekonomi Daerah**, ditunjukkan melalui pertumbuhan PDRB, pertumbuhan Sektoral PDRB, PDRB Perkapita, Inflasi dan Indeks Pemerataan Pendapatan.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Grobogan dari tahun 2008 sampai dengan 2011 selalu mengalami pertumbuhan yang positif, meskipun angkanya fluktuatif. Adapun PDRB pada tahun 2011, Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp.3.403.295.665.000,- dan Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp.7.253.293.980.000,-.

Sedangkan dilihat dari **Pertumbuhan Sektoral terhadap PDRB**, komposisinya mengalami pergeseran. Pada tahun 2008 pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor pertambangan dan galian, sedang pada tahun 2011 ditempati oleh sektor jasa. Hal ini menunjukkan adanya lapangan usaha yang bergerak lebih cepat dari sektor lain. Oleh karena itu perlu diambil strategi yang tepat untuk dapat mempertahankan sektor lapangan usaha yang sudah maju, dan mengatasi permasalahan terhadap sektor lapangan usaha yang sedang lesu.

Sementara untuk **PDRB Per Kapita**, kondisinya terus mengalami kenaikan. Terakhir pada tahun 2011, tercatat sebesar Rp.5.112.378,23 atas dasar Harga Berlaku, dan Rp.2.398.763,90 atas dasar Harga Konstan.

Inflasi di Kabupaten Grobogan selama 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2008 menyentuh dua digit yaitu sebesar 13,59 sedangkan pada 2 tahun terakhir terus mengalami penurunan, hingga pada tahun 2011 sebesar 3,86. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011 perekonomian daerah semakin stabil, karena nilai barang tidak banyak mengalami kenaikan, sehingga tidak mengganggu daya beli masyarakat.

Selanjutnya untuk melihat **Pemerataan Pendapatan**, digunakan indikator **Gini Ratio** dan **Proporsi Pendapatan Yang Dinikmati Oleh Kelompok 40% Penduduk Yang Berpendapatan Terendah**. Berdasarkan indikator tersebut, distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Grobogan masih berada pada kategori ketimpangan rendah. Hal ini dilihat dari :

Pertama; bahwa indikator *Gini Ratio* mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 selalu di bawah angka 0,35.

Kedua; bahwa berdasarkan kriteria Bank Dunia, 40% penduduk yang berpendapatan rendah, mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, menerima lebih dari 17% dari pendapatan total kabupaten.

C. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, APBD Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan berdasarkan prinsip Keadilan, Efisiensi dan Efektifitas, Anggaran Berimbang dan Dinamis, Disiplin, Transparansi, serta Akuntabilitas.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011, didasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan secara teknis penyusunan APBD didasarkan pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

APBD Tahun Anggaran 2011 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, sedangkan perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011.

Selanjutnya, secara ringkas akan saya sampaikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Namun perlu diketahui bahwa angka realisasi APBD yang disampaikan ini, masih bersifat sementara atau belum final, karena belum selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2011 sebesar Rp.1.163.858.400.019,- atau 101,74%. Realisasi pendapatan daerah tersebut berasal dari : Pendapatan Asli Daerah, sebesar Rp.88.013.098.194,- atau 104,34%, Dana Perimbangan, sebesar Rp.1.048.801.726.825,- atau 101,60 % dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, sebesar Rp.27.043.575.000,- atau 98,79%.

Target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2011, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2011

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	84.349.354.734	88.013.103.461	104,34
	a. Pajak Daerah	13.080.600.000	14.990.198.823	114,60
	b. Retribusi Daerah	14.512.339.000	14.261.854.045	98,27
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.537.294.705	5.895.692.871	166,67
	d. Lain-lain PAD Yang Sah	53.219.121.029	52.865.357.722	99,34
2.	DANA PERIMBANGAN	1.032.269.067.148	1.048.801.726.825	101,60
	a. Bagi hasil pajak	54.843.084.429	56.438.628.785	102,91
	b. Bagi hasil hasil Bukan Pajak (SDA)	2.453.097.253	1.734.643.398	70,71
	c. Dana Alokasi Umum	668.995.423.000	668.995.422.000	100,00
	d. Dana Alokasi Khusus	78.239.100.000	78.239.100.000	100,00
	e. Dana penyesuaian	193.272.367.280	193.272.367.280	100,00
	f. Bagi hasil pajak dari Provinsi	34.465.995.186	50.121.565.362	145,42
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	27.373.575.000	27.043.575.000	98,79
	a. Pendapatan Hibah	-	-	-
	b. Pendapatan lainnya	27.373.575.000	27.043.575.000	98,79
	JUMLAH 1 s/d 3	1.143.991.996.882	1.163.858.405.286	101,74

Sumber : DPPKAD Grobogan Tahun Anggaran 2011, belum diaudit BPK.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah sebesar Rp.1.173.213.711.868,- atau 94,60% dengan rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp.763.713.596.921,- atau 98,53% dan Belanja Langsung, sebesar Rp.409.500.114.947,- atau 88,05%.

Target dan realisasi belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2011, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2
Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2011

No	BELANJA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	775.111.962.681	763.713.596.921	98,53
1	Belanja Pegawai	679.550.262.000	675.042.247.926	99,29
2	Belanja Bunga	267.920.360	255.955.760	95,53
3	Belanja Hibah	28.747.634.400	26.065.640.186	90,67
4	Belanja Bantuan Sosial	25.484.120.000	23.609.166.778	92,64
5	Belanja Bagi Hasil	1.100.000.000	1.097.550.000	99,78
6	Belanja Bantuan Keuangan	29.861.150.000	28.072.511.525	94,01
7	Belanja Tidak Terduga	10.100.875.921	9.570.524.746	94,75
B	BELANJA LANGSUNG	465.072.253.040	409.500.114.947	88,05
1	Belanja Pegawai	52.121.235.310	50.175.681.507	94,24
2	Belanja Barang dan Jasa	207.305.024.939	198.002.896.664	88,01
3	Belanja Modal	205.645.992.791	161.321.536.776	76,69
	JUMLAH A + B	1.240.184.215.721	1.173.213.711.868	94,60

Sumber : DPPKAD Grobogan Tahun Anggaran 2011, belum diaudit BPK.

Penyerapan belanja langsung yang mencapai 88,05% disebabkan karena adanya penghematan-penghematan dari program kegiatan yang dilaksanakan.

Selain itu terdapat 53 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2011, antara lain disebabkan karena juklak dan juknis terlambat, gagal lelang, tidak cukup waktu untuk melaksanakan dan sebab lainnya. Kegiatan itu sebagian besar bersumber dari Bantuan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total anggaran sebesar Rp. 34.468.403.000,- atau 7,41%. Namun demikian, sebagian besar kegiatan telah dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2012.

3. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada tahun anggaran 2011 Pembiayaan Netto dalam angka positif, sehingga dapat menutup defisit anggaran dan masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.35.580.272.879,-.

Tabel 3
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2011

URAIAN	TARGET	REALISASI
Pendapatan	1.143.991.996.882	1.163.858.405.286
Belanja	1.240.184.215.721	1.173.213.711.868
SURPLUS/DEFISIT	(96.192.218.839)	(9.355.306.582)
Penerimaan Pembiayaan	125.034.299.623	70.556.130.412
Pengeluaran Pembiayaan	28.842.080.784	25.620.550.951
PEMBIAYAAN NETTO	96.192.218.839	44.935.579.461
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	35.580.272.879

Sumber : DPPKAD Grobogan Tahun Anggaran 2011, belum diaudit BPK.

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI

Berdasarkan visi jangka panjang 20 tahun Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka visi jangka menengah untuk 5 tahun sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan yang maju, mandiri, berbadan sehat dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertumpu pada keunggulan di bidang pertanian, perdagangan, industri kecil, dan pariwisata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”

Berdasarkan visi untuk 5 tahun tersebut, dan berdasarkan misi jangka panjang 20 tahun, maka **misi untuk 5 tahun mendatang** adalah :

1. Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pengelolaan dan pemasarannya untuk mendukung pengembangan perdagangan dan industri kecil guna meningkatkan perekonomian daerah.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah, melalui penciptaan sistem perijinan yang mudah, murah dan cepat guna mendukung peningkatan investasi dan penanaman modal.
3. Meningkatkan daya tarik dan pengelolaan potensi wisata daerah.
4. Meningkatkan peran koperasi, agar benar-benar menjadi soko guru perekonomian daerah, regional dan nasional
5. Menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur), serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, dan olah raga.
7. Menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi dan penegakan hukum.
8. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui program pemberdayaan, khususnya kaum wanita.

9. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban, agar masyarakat dapat beraktifitas dengan tenang.
10. Mengenali dan memberdayakan potensi PAD dengan tetap memperhatikan kemampuan dan tidak menghambat perekonomian masyarakat.
11. Menentukan kebijakan yang akan mendorong perkembangan dunia pendidikan.
12. Mewujudkan pembangunan moral spiritual melalui bidang agama dan budaya.
13. Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai perkembangan keadaan sebagai upaya mempromosikan daerah dan kegiatan pembangunan daerah serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih.

B. ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah serta tetap menjaga kestabilan harga dalam rangka meningkatkan penyediaan barang dan jasa bagi kebutuhan masyarakat serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2011 berpedoman pada tujuh prinsip pengarusutamaan yang merupakan kesepakatan bagi seluruh aparatur negara, yaitu :

1. Pengarusutamaan partisipasi masyarakat
2. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.
3. Pengarusutamaan gender
4. Pengarusutamaan tata pengelolaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
5. Pengurangan kesenjangan antar wilayah dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan serta daerah tertinggal.
6. Pelaksanaan otonomi daerah
7. Pelaksanaan padat karya

C. PRIORITAS DAERAH

1. Prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan.

Prioritas yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan dan pengurangan penduduk miskin antara lain adalah :

- a. Mengembangkan Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
- b. Mengembangkan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin,

- c. Mengembangkan pengelolaan kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan,
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan utamanya yang menyangkut hajat hidup orang banyak (umum dan miskin),
- e. Meningkatkan pengarusutamaan gender penanggulangan kemiskinan dalam proses pembangunan,
- f. Meningkatkan akses informasi (jaringan pemasaran produk lokal) dan komunikasi bagi masyarakat *grass root* (masyarakat rendah),
- g. Meningkatkan berbagai jenis ketrampilan bagi penduduk miskin,
- h. Meningkatkan pelatihan manajemen kelompok bagi pengembangan UKP (Usaha Kerja Produktif) bagi kelompok penduduk miskin,
- i. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik,
- j. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat miskin, sehingga akan dapat meningkatkan ketrampilannya dan sumber penghidupannya (pendapatannya),
- k. Memberdayakan fakir miskin dan penyandang masalah sosial,
- l. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menangani kemiskinan di lingkungannya dan perbaikan gizi buruk.

2. Prioritas penyediaan sarana dan prasarana umum daerah.

Prioritas penyediaan sarana dan prasarana umum meliputi aspek-aspek yang antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas jalan-jalan kabupaten,
- b. Meningkatkan kualitas jembatan kabupaten,
- c. Meningkatkan kualitas pengawasan pembangunan infrastruktur,
- d. Melakukan normalisasi sungai-sungai alam yang mengalami kedangkalan,
- e. Melakukan perawatan sarana dan prasarana irigasi,
- f. Mengembangkan irigasi pedesaan,
- g. Mengembangkan penyediaan air bersih berbasis masyarakat melalui program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS),
- h. Peningkatan manajemen pengelolaan pertanahan yang transparan dan bertanggung jawab,
- i. Peningkatan dan pengawasan bangunan yang sesuai dengan RTRW,
- j. Pengaturan dan pengarahan yang jelas tentang tumbuhnya permukiman sesuai dengan arahan RTRW baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat Propinsi Jawa Tengah.

3. **Prioritas perluasan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.**

Prioritas yang yang perlu dilaksanakan dalam rangka perluasan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran antara lain :

- a. meningkatkan layanan informasi pasar kerja (IPK).
- b. meningkatkan kualitas ketrampilan tenaga kerja.
- c. meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja.
- d. meningkatkan ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan.
- e. meningkatkan fasilitas terhadap AKAD (Angkatan Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Angkatan Kerja Antar Negara).
- f. Pemberian sertifikasi atas penguasaan ketrampilan tertentu,
- g. Pelatihan kewirausahaan bagi penganggur,
- h. Perluasan jaringan kerja sama penempatan tenaga kerja,
- i. Sosialisasi syarat-syarat kerja,
- j. Pengawasan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan,
- k. Pelatihan manajemen kelompok bagi UKP (Usaha Kelompok Produktif) bagi pemuda putus sekolah,
- l. Menurunkan jumlah pengangguran terbuka dan setengah menganggur.

4. **Memantapkan pembangunan di bidang ekonomi, melalui pengelolaan produk unggulan dan andalan di berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

Seluruh bidang pembangunan di bidang ekonomi daerah perlu di Prioritas, antara lain :

- a. **Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)** meliputi :
 - 1) meningkatkan daya saing usaha koperasi dan UKM;
 - 2) meningkatkan akses koperasi dan UKM terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan;
 - 3) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap koperasi;
 - 4) meningkatkan kemitraan antar koperasi dan UKM maupun dengan badan usaha lainnya.
- b. **Bidang Perindustrian** antara lain sebagai berikut :
 - 1) meningkatkan penerapan iptek dalam perindustrian daerah;
 - 2) meningkatkan kemampuan SDM perindustrian daerah;
 - 3) meningkatkan kinerja industri kecil menengah (IKM);
 - 4) meningkatkan jaringan kerjasama antara IKM dengan Swasta;
 - 5) mengembangkan pemanfaatan energi minyak jarak;
 - 6) mengembangkan sentra-sentra industri potensial daerah.

- c. **Bidang energi dan sumber daya mineral** antara lain sebagai berikut :
- 1) mengoptimalkan upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral;
 - 2) mengoptimalkan upaya reklamasi lahan paska penambangan untuk menekan kerusakan lingkungan;
 - 3) mendorong pertambangan rakyat agar memiliki ijin usaha/legal;
 - 4) mengoptimalkan regulasi pengelolaan ABT (air bawah tanah);
 - 5) meningkatkan kualitas SDM pengelola pertambangan rakyat;
 - 6) meningkatkan rasio elektrifikasi di Kabupaten Grobogan;
 - 7) mengoptimalkan perkembangan dan pemanfaatan potensi energi alternatif.
- d. **Bidang Pariwisata** antara lain sebagai berikut:
- 1) mengoptimalkan pengelolaan potensi pariwisata daerah;
 - 2) meningkatkan daya tarik potensi pariwisata daerah;
 - 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang pariwisata;
 - 4) mengoptimalkan kegiatan promosi pariwisata daerah;
 - 5) meningkatkan kualitas dan kuantitas pemandu wisata daerah;
 - 6) meningkatkan dukungan dunia usaha untuk mendukung kegiatan wisata daerah;
 - 7) mengoptimalkan kerjasama antar daerah dalam mengembangkan pariwisata.
- e. **Bidang Perhubungan** antara lain sebagai berikut:
- 1) meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas angkutan jalan;
 - 2) mengoptimalkan pemasangan rambu-rambu jalan yang terpasang di jalan-jalan utama Kabupaten Grobogan;
 - 3) meningkatkan penegakan disiplin tertib berlalu lintas ;
 - 4) meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum terhadap para penumpang.
- f. **Bidang Pertanian dan Perkebunan**, antara lain sebagai berikut :
- 1) meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) meningkatkan adopsi teknologi di bidang pertanian dan perkebunan;
 - 3) menumbuhkembangkan kelembagaan tani;
 - 4) meningkatkan aksesibilitas petani pada sumber teknologi, permodalan dan pemasaran;
 - 5) mengendalikan serangan hama dan ppenyakit sehingga tidak merugikan petani;

- 6) meningkatkan mutu produksi pertanian agar harga jualnya menjadi meningkat pula;
 - 7) meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, serta keseimbangan gizi pada masyarakat;
 - 8) meningkatkan kesadaran masyarakat mengkonsumsi pangan non beras, sehingga ketergantungan kepada kebutuhan beras dapat dikurangi.
- g. **Bidang Perikanan** antara lain sebagai berikut:
- 1) meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petani ikan;
 - 2) meningkatkan produksi ikan;
 - 3) menanggulangi ancaman hama dan penyakit perikanan;
 - 4) mengembangkan industri rumah tangga pengolahan ikan sebagai komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga.
 - 5) meningkatkan daya saing produksi perikanan
 - 6) meningkatkan industrialisasi pedesaan di bidang perikanan yang mengarah keaneka pangan pokok.
- h. **Bidang kehutanan** antara lain sebagai berikut:
- 1) meningkatkan kelembagaan dalam pembangunan hutan;
 - 2) menekan tingkat kerusakan hutan;
 - 3) mengoptimalkan pemanfaatan hutan dan hasil hutan rakyat sebagai bahan baku industri ;
 - 4) mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat dalam mendukung pembangunan kehutanan;
 - 5) meningkatkan kesejahteraan petani hutan sosial dan hutan kemasyarakatan;
 - 6) pengembangan kawasan agropolitan kehutanan;
 - 7) meningkatkan sentra-sentra produksi kehutanan;
 - 8) meningkatkan teknologi tepat guna di lingkungan kehutanan.
- i. **Bidang Penanaman Modal** antara lain meliputi :
- 1) meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Grobogan;
 - 2) mengoptimalkan promosi investasi dalam rangka menawarkan produk-produk unggulan, andalan dan potensial;
 - 3) meningkatkan fasilitas kerjasama pengembangan investasi, baik antar pengusaha, maupun pengusaha dengan pemerintah
 - 4) meningkatkan kinerja pelayanan satu atap (*one stop service*);
 - 5) meningkatkan penyediaan data dan informasi potensi investasi.
 - 6) mengembangkan BUMD yang bersifat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna mendinamisasi masyarakat.

j. **Bidang Perdagangan** antara lain sebagai berikut :

- 1) meningkatkan kelancaran sistem distribusi barang dan jasa kebutuhan dasar masyarakat;
- 2) mencegah peningkatan harga-harga kebutuhan pokok menjelang hari raya dan hari-hari besar keagamaan;
- 3) mengoptimalkan kerjasama kemitraan dalam perdagangan;
- 4) mengoptimalkan penyebaran dan informasi pasar kepada masyarakat;
- 5) meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan ekspor dan impor;
- 6) mengembangkan sentra-sentra industri potensial daerah;
- 7) meningkatkan pengaturan dan pembinaan serta penyediaan tempat usaha bagi pedagang kaki lima (PKL) sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan.

Prioritas pembangunan daerah dalam rangka memantapkan pembangunan bidang pendidikan antara lain adalah :

- a. menuntaskan dan memantau tindak lanjut Wajar 9 tahun;
- b. menuntaskan dan memantau kelanjutan program Buta Aksara;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas;
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan ke jenjang tingkat nasional dan internasional;
- e. meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalisme serta kesejahteraan tenaga pendidik;
- f. memberdayakan lembaga pendidikan, baik formal maupun informal dalam pembentukan kualitas SDM berwawasan IPTEK dan IMTAQ;
- g. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- h. meningkatkan kinerja, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan;
- i. memacu dan meningkatkan minat baca masyarakat;
- j. meningkatkan kualitas perpustakaan daerah.

6. Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan.

Prioritas pembangunan daerah dalam rangka memantapkan pembangunan bidang kesehatan antara lain adalah :

- a. menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat serta perbekalan kesehatan masyarakat;
- b. memberdayakan masyarakat dalam rangka menumbuhkan perilaku hidup sehat ;

- c. meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan SDM tenaga kesehatan;
- e. meningkatkan status gizi keluarga dan masyarakat
- f. meningkatkan kesehatan lingkungan;
- g. meningkatkan pelayanan kesehatan untuk pasien miskin;
- h. meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat;
- i. meningkatkan penanganan wabah penyakit menular;
- k. meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

7. Prioritas penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Upaya yang dilakukan meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran hukum, mewujudkan supremasi hukum dan HAM baik di masyarakat maupun di aparat pemerintah,
- b. Meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat,
- c. Meningkatkan pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal,
- d. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan,
- e. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan bertanggung jawab,
- f. Mengoptimalkan pengawasan internal pemerintahan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
- g. Mengoptimalkan dan menindaklanjuti penanganan aduan masyarakat yang didukung data yang benar dan bertanggung jawab,
- h. Peningkatan kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang bertanggung jawab,
- i. Peningkatan optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk mewujudkan pemerintah yang efektif dan efisien,
- j. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa terhadap pelaksanaan keuangan daerah untuk semakin meminimalkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
- k. Perlu meningkatkan optimalisasi segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
- l. Melaksanakan Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan yang meliputi : program pro rakyat, keadilan untuk semua dan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).

III. URUSAN DESENTRALISASI

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2011, Kabupaten Grobogan melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.409.500.114.947,- atau mencapai 88,05%. Dengan perincian penyelenggaraan urusan wajib terealisasi sebesar Rp.384.355.722.195,- atau 87,92%, Sedangkan urusan pilihan terealisasi sebesar Rp.25.144.392.752,- atau 90,03%.

Selanjutnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2011, secara singkat dipaparkan sebagai berikut:

A. Prioritas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam tiga tahun terakhir sampai tahun 2010, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, baik secara absolut maupun secara persentase dari jumlah total penduduk. Secara absolut, jumlah penduduk miskin tahun 2010 tercatat sebesar 233.700 jiwa atau menurun sebesar 42.965 jiwa dari jumlah tahun 2008. Demikian halnya secara persentase, mengalami penurunan sebesar 3,29% dari 19,82% menjadi 16,54%.

Upaya untuk melaksanakan prioritas ini ditempuh melalui urusan Sosial dan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diimplementasikan ke dalam 20 program 83 kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.230.572.230,- atau 95,84%.

Adapun program kegiatan yang dilaksanakan, di antaranya sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan ormas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditempuh melalui kegiatan Bimbingan Sosial bagi Pekerja Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial serta Bimbingan Sosial bagi Karang Taruna dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan lembaga ekonomi pedesaan, yang ditempuh melalui Penunangan PNPM Mandiri tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, Pembinaan Teknis UED-SP, UP2K, Lumbung Desa dan Pasar Desa.

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, yang ditempuh melalui : Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu, Perencanaan Koordinasi Pengendalian TMMD,

Penyiapan Masyarakat dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) serta bantuan Pengadaan Aspal, Paving dan Dlurung untuk masyarakat.

4. Program Pengentasan Kemiskinan

Program ini diarahkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat, yang ditempuh melalui : Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PPM PMT-AS), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dan Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Raskin.

Selanjutnya guna mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui belanja langsung di atas, dalam APBD Tahun Anggaran 2011 telah dialokasikan anggaran yang bertujuan mendukung prioritas penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Fungsi Ekonomi dan Fungsi Perlindungan Sosial, bantuan lumbung desa, dan kegiatan TMMD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.14.545.734.970,- atau 95,92%.

Selain itu, perlu saya sampaikan bahwa upaya-upaya penanggulangan kemiskinan tersebut, pada tahun 2011, juga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.43.818.157.000,- atau mencapai 99,97% meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di 18 kecamatan;
2. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) berada di 17 Desa dalam Kecamatan Purwodadi;
3. Program Lingkungan sehat perumahan dengan kegiatan PAMSIMAS di 13 desa dalam 12 kecamatan; dan
4. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di 6 desa dalam 3 kecamatan.

B. Prioritas penyediaan sarana dan prasarana umum daerah

Usaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum daerah, dilakukan melalui Urusan Pekerjaan Umum, yang diimplementasikan ke dalam 15 program dan 414 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.65.099.784.369,- atau 94,45 %.

Adapun prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Upaya perbaikan kondisi prasarana umum jalan pada tahun 2011 dapat dilihat dari bertambahnya ruas jalan Kondisi Mantap sepanjang 11,9 km atau 4,26%, bertambahnya jalan dalam Kondisi Sedang sepanjang 14,2 km atau 4,88%,

dan berkurangnya jalan Rusak Ringan sepanjang 14,2 km atau 7,92% serta berkurangnya jalan Rusak Berat sepanjang 11,9 km atau 9,2%.

Program ini dilaksanakan melalui 240 paket peningkatan jalan sepanjang ± 55,94 km, meliputi 34 paket Kontruksi paving block sepanjang 7,33 km, 101 paket Beton setapak sepanjang 10,56 km, 25 paket Beton Full Rigid sepanjang 1,52 km, 28 paket ATB sepanjang 14,24 km, 50 paket Telford sepanjang 22,08km dan 2 paket pembangunan Trotoar sepanjang 200 m.

2. Program Pemeliharaan jalan dan jembatan

Program ini dilaksanakan melalui 16 paket pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan realisasi kegiatan berupa 6 paket Beton setapak sepanjang 520 m, 2 paket Beton Full Rigid sepanjang 230 m, 1 paket ATB sepanjang 220 m, 7 paket Trotoar sepanjang 5700 m dan 3 paket rehab jembatan total sepanjang 30m.

3. Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Program ini diarahkan untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi guna meningkatkan suplai air irigasi, yang ditempuh melalui 71 kegiatan meliputi: rehab saluran induk, saluran sekunder, saluran tersier, rehab bendung dan talang air.

4. Program Pengendalian Banjir

Program ini dilaksanakan melalui 12 kegiatan, dengan realisasi antara lain berupa : pemasangan bronjong, pembuatan talud, normalisasi avour dan perbaikan bantaran kali.

C. Prioritas Perluasan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran

Penyerapan tenaga kerja sampai akhir tahun 2011 mencapai 722.501 orang dari jumlah angkatan kerja sebanyak 756.723 orang. Jika dibandingkan dengan kondisi 3 tahun terakhir, maka angka perkembangan dan penyerapan tenaga kerja, memperlihatkan tren yang menjanjikan, dimana angka prediksi pengangguran menurun sebesar 1,7% yaitu dari angka 6,2% menjadi 4,5%.

Kondisi tersebut adalah hasil upaya Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan urusan ketenagakerjaan, yang diimplementasikan melalui 3 program 15 kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.919.772.050,- atau 95,20%.

Adapun program yang ditempuh antara lain program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, program Peningkatan Kesempatan Kerja serta program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Selain program dan kegiatan yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga memperoleh dukungan dari pemerintah pusat melalui Tugas Pembantuan, berupa kegiatan Pengembangan dan Peningkatan

Perluasan Kesempatan Kerja dengan realisasi anggaran sebesar Rp.522.411.000,- atau 98,94%.

D. Memantapkan pembangunan di bidang ekonomi, melalui pengelolaan produk unggulan dan andalan di berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dalam pembangunan di bidang ekonomi, urusan pemerintahan yang terkait dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat diselenggarakan dengan seoptimal mungkin. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi : Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Perhubungan, Pertanian, Kehutanan, Penanaman Modal serta Perdagangan.

Adapun pelaksanaan urusan tersebut secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. **Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**, diimplementasikan melalui 8 program 45 kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar sebesar Rp.2.148.974.386,- atau 99,72%. Urusan ini diselenggarakan dalam rangka penciptaan iklim usaha yang kondusif, melalui Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
2. **Urusan Industri**, dilaksanakan melalui 6 program 23 kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.883.788.621,- atau 94,61%. Urusan ini diselenggarakan guna pengembangan industri kecil dan menengah serta peningkatan kemampuan teknologi industri.
3. **Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)**, diimplementasikan melalui 1 program 6 kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.640.994.500,- atau sebesar 23,87%. Urusan ini diselenggarakan dengan menjalankan Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan pengadaan jaringan listrik baru.
4. **Urusan Pariwisata**, dilaksanakan melalui 3 program 6 kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.308.842.500,- atau 88,24%. Urusan ini diselenggarakan melalui program pengembangan dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi wisata dan pengembangan kemitraan dengan lembaga lain guna mempromosikan potensi wisata.
5. **Urusan Perhubungan**, diimplementasikan melalui 6 program 20 kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.781.714.349,- atau sebesar 91,61%. Urusan ini diselenggarakan melalui upaya peningkatan pelayanan angkutan serta pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

6. **Urusan Pertanian**, dilaksanakan melalui 13 program 171 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.19.023.161.358,- atau 97,58%. Urusan ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, pemasaran hasil produksi pertanian, penerapan teknologi pertanian dan perkebunan, pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, peningkatan produksi pertanian dan perkebunan serta penyediaan sarana dan prasarana usaha pertanian.
7. **Urusan Kehutanan**, dilaksanakan melalui 7 program 45 kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.150.456.673,- atau 95,28%. Urusan ini diselenggarakan dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan konservasi sumber daya hutan.
8. **Urusan Penanaman Modal**, dilaksanakan melalui Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.89.992.000,- atau 99,99%. Urusan ini diselenggarakan untuk mewujudkan keikutsertaan promosi dan meningkatkan kerjasama investasi terhadap produk-produk unggulan daerah.
9. **Urusan Perdagangan**, diimplementasikan melalui 1 program 2 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.327.038.900,- atau 98,11%. Urusan ini dilaksanakan untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan bahan pokok, kelancaran distribusi dan stabilitas harga, yang ditempuh melalui Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

E. Memantapkan Pembangunan di Bidang Pendidikan

Dalam rangka memantapkan kualitas pendidikan, dilaksanakan melalui penyelenggaraan Urusan Pendidikan dan Urusan Perpustakaan yang diimplementasikan ke dalam 16 program 218 kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.160.102.287.768,- atau 80,86%.

Adapun realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Program ini telah direalisasikan ke dalam berbagai kegiatan dalam rangka mendukung program nasional penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan, kelancaran proses belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun.

Adapun capaian program dan kegiatan, antara lain : Rehab sedang dan berat ruang kelas, Pengadaan buku, mebelair dan ruang perpustakaan serta Pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pembelajaran.

2. Program Pendidikan Menengah

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas lulusan pendidikan menengah yang siap meneruskan ke jenjang lebih tinggi serta siap bersaing di bursa kerja, khususnya dengan meningkatkan mutu pendidikan sekolah kejuruan.

Adapun capaian program dan kegiatan antara lain: Lomba Siswa Berbakat/Potensial, Pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, Rehab dan pengadaan ruang kelas serta Pengadaan alat kesenian dan alat peraga pendidikan.

3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dapat berjalan optimal.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Sertifikasi Guru, Penilaian Kinerja dan Seleksi Kepala Sekolah, Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti, Bantuan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Bagi Guru dan Pengembangan Profesi Guru.

4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas data pendidikan dan kualitas guru, yang ditempuh melalui Penunangan kegiatan dewan pendidikan, Validasi data pendidikan, Pengelolaan BOS, Pembinaan nasionalisme dan Manajemen pendataan pendidikan.

Selain belanja langsung tersebut di atas, juga dialokasikan belanja tidak langsung berupa : Bantuan dana BOS, Bantuan hibah ke SMK swasta, Bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Fungsi Pendidikan serta Bantuan Hibah Pendidikan dari Gubernur Jawa Tengah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.005.299.000,- atau 91,99%.

F. Memantapkan Pembangunan di Bidang Kesehatan

Kemajuan di bidang Kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator keberhasilan pembangunan kesehatan, yaitu Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Balita, dan Berat Bayi Lahir Rendah.

Adapun capaian indikator keberhasilan kesehatan tersebut, secara singkat diuraikan sebagai berikut :

Angka Kematian Bayi (AKB), pada tahun 2011 tercatat sebesar 8,78 per 1.000 kelahiran hidup, yang berarti terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 11,86 per 1.000 kelahiran hidup. Di samping itu, angka ini juga telah melampaui target Grobogan Sehat 2010 sebesar 40 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI), pada tahun 2011 sebesar 114,04 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010, yaitu sebesar 80,02 per 100.000 kelahiran hidup. Namun angka ini masih melampaui target Grobogan Sehat 2010 sebesar 150 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Balita (AKBAL), pada tahun 2011 sebesar 9,12 per 1.000 balita, terjadi penurunan dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 12,22 per 1.000 balita. Penurunan ini sebagai pertanda telah terjadi perbaikan di sektor kesehatan balita. Indikator AKBAL inipun, juga melampaui target Grobogan Sehat 2010 sebesar 58 per 1000 balita.

Prevalensi Gizi Buruk, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 mengalami stagnasi, yaitu berkisar angka 0,03%.

Capaian penyelenggaraan Urusan Kesehatan tersebut, dilaksanakan melalui 17 Program 114 kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.62.051.555.230,- atau 93,87%. Adapun Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di antaranya sebagai berikut :

1. Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program ini diarahkan untuk penyediaan kebutuhan obat, yang ditempuh melalui kegiatan : Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan, Pengadaan obat operasional puskesmas, dan Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan.

2. Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, yang dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : Perbaikan gizi masyarakat, Penyelenggaraan penyehatan lingkungan sehat, Pengembangan laboratorium puskesmas, Peningkatan fungsi Polindes, Penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium serta Pemantauan dan pengendalian program kesehatan.

3. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai upaya meningkatkan arus informasi dan peran aktif masyarakat pada bidang kesehatan, telah dilakukan kegiatan : Promosi Kesehatan, Pengembangan Desa Siaga, Pengembangan Posyandu, Pembinaan Obat Tradisional, Pembinaan Saka Bhakti Husada, Pembinaan UKS/UKGS,

Pengembangan Upaya Kesehatan Kerja, Pembinaan PHBS dan Pengembangan Pos Kesehatan Pesantren.

4. Pelayanan Kesehatan Penduduk

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal serta Pembayaran klaim asuransi kesehatan.

5. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasien, dilaksanakan melalui kegiatan : Pengadaan obat-obatan, Bahan-bahan logistik, Bahan hemodialisa, Bahan radiologi, bahan laboratorium, Alat-alat medik, dan Pengembangan ruang perinatologi.

6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program ini ditempuh melalui kegiatan Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Pembinaan Bidan Desa, Pelacakan Kasus Kematian Maternal Perinatal dan Pengadaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak.

Selanjutnya guna mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui belanja langsung di atas, dalam APBD Tahun Anggaran 2011 juga dialokasikan anggaran yang bertujuan mendukung prioritas urusan Kesehatan melalui bantuan Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Grobogan, Hibah kepada RSI dan Bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Fungsi Kesehatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.400.117.942,- atau 89,96%.

Selain itu, perlu saya sampaikan bahwa upaya-upaya perbaikan di bidang kesehatan, juga mendapatkan dukungan dari Pemerintah dalam bentuk Tugas Pembantuan, berupa kegiatan bantuan operasional kesehatan bagi Puskesmas, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.223.653.700,- atau 94,79%.

G. Prioritas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Prioritas ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas kegiatan pembangunan, kualitas pelayanan perijinan dan kualitas aparatur pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut ditempuh melalui 22 program 370 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.63.695.506.219,- atau 93,06%, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, di 3 SKPD.
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, tersebar di 32 SKPD.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, tersebar di 24 SKPD.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, tersebar di 23 SKPD.
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, di 15 SKPD.

Di samping itu, untuk mendukung program dan kegiatan ini juga dialokasikan anggaran melalui bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa meliputi TPAPD dan TKAPD, Bantuan Desa Kurang Hasil, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, Stimulus Percepatan Pelunasan PBB Desa/Kelurahan, Bantuan Keuangan kepada RT dan RW, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.28.072.511.525,- atau 94,64%.

IV. TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2011, Kabupaten Grobogan hanya menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah, tidak terdapat Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi. Tugas Pembantuan dimaksud meliputi 6 Urusan, yaitu : Urusan Kesehatan, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Urusan Pertanian, dan Urusan Perumahan dengan total anggaran sebesar Rp.58.367.807.000,- dan terserap sebesar Rp.57.974.325.350,- atau 99,33%. Dengan rincian sebagai berikut :

- A. Urusan Kesehatan,** melalui Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dan Program Program Lingkungan Sehat.
- B. Urusan Ketenagakerjaan,** melalui Program Penempatan dan Perluasan Kerja.
- C. Urusan Ketahanan Pangan,** melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
- D. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,** melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- E. Urusan Pertanian,** melalui Program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan serta Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
- F. Urusan Perumahan,** melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Program Lingkungan sehat Perumahan dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

Secara keseluruhan Tugas Pembantuan tersebut, telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Kita berharap semoga pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat lebih banyak lagi menerima Tugas Pembantuan. Dengan demikian dapat lebih meringankan beban APBD dalam kegiatan pembangunan.

V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah dilaksanakan melalui Forum Kedungsepur. Hasil yang dicapai, yaitu disepakatinya kembali atau perpanjangan MoU tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Daerah dengan Pemkab Kendal, Pemkab Demak, Pemkab Semarang, Pemkot Salatiga, dan Pemkot Semarang serta Pemkab Grobogan (Kedungsepur).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga telah melakukan kerjasama dengan daerah atau kabupaten lain dalam penyelenggaraan transmigrasi, yaitu dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Adapun Kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan pihak ketiga, diantaranya yaitu :

1. Kerjasama dengan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru.
2. Kerjasama dengan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Pemerintah Daerah Dan PD BPR BKK Purwodadi tentang Program Pemberdayaan Keluarga dan Penyaluran Pusaka Dana Mandiri (PUNDI).
3. Kerjasama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dengan RSUD Dr R Soedjati Soemodjardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga melakukan kerjasama dengan Lembaga Plan Internasional Unit Kabupaten Grobogan, melalui Kerjasama di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Anak.

Kerjasama dibidang pendidikan dilaksanakan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah, pengembangan model pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus tuna rungu dan tuna wicara serta pembangunan sarana pendidikan SDN yang telah terealisasi 90% dari target 17 SD.

Kerjasama dibidang kesehatan, dilaksanakan melalui program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dengan capaian 100 desa terbebas dari buang air besar sembarangan (ODF).

Selanjutnya kerjasama dalam upaya Perlindungan Anak, telah dibentuk Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD) di 17 Desa

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Kebijakan koordinasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan instansi vertikal, diarahkan untuk mencapai keterpaduan, keselarasan dan

keharmonisan untuk menciptakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kehidupan sosial masyarakat.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Kebijakan pembinaan batas wilayah pada tahun 2011, telah diwujudkan melalui kegiatan penegasan batas daerah, yang menghasilkan penetapan batas daerah yang jelas dan pasti, baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Realisasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Grobogan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Pada Tahap Pra Bencana, dilakukan pendataan ulang jenis dan karakter bencana berikut peningkatan SDM di wilayah rawan bencana, melalui sosialisasi, peningkatan kemampuan, pendidikan dan pelatihan, serta upaya pencegahan lainnya.
2. Pada Saat Tanggap Darurat, diawali rapat koordinasi terpadu, apel siaga dan kesiapsiagaan, melalui piket 1 x 24 jam di Posko Induk oleh unit operasional PBP dan Satlinmas PBP secara serentak.
3. Pada saat Pasca bencana, dilaksanakan pendataan dan rehabilitasi/rekonstruksi sarana prasarana yang rusak akibat bencana, dan mengupayakan bantuan baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, maupun dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Sampai tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak mempunyai kawasan khusus, yang ada adalah kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan.

G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pada tahun 2011, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Grobogan dapat terjaga dengan kondusif, tidak terjadi konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme maupun lainnya, ini semua berkat kerjasama lintas sektoral yang mantap antar aparat keamanan, serta dukungan dari berbagai unsur masyarakat.

H. Hal lain-lain.

Beberapa prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kabupaten Grobogan pada Tahun 2011, sebagai berikut :

1. Penghargaan Tingkat Nasional Atas Jasa dan Dharma Bhakti Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam Memajukan Kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah;
2. Penghargaan dalam bidang Pengarus Utama Gender (PUG) Tingkat Nasional Anugrah Parahita Eka Praya;
3. Penghargaan Tingkat Nasional Pelaksana Terbaik Kabupaten Layak Anak;
4. Penghargaan Tingkat Nasional Inovator Pengembangan Pemerhati Anak BerKebutuhan Khusus;
5. Penghargaan Tingkat Nasional Satya Lencana Wira Karya;
6. Penghargaan Tingkat Nasional *Transmigration Award*;
7. Juara I lomba Inseminator Tingkat Nasional, atas nama Mulyono, AMD Kecamatan Wirosari;
8. Juara I Tk Nasional Kelompok Berprestasi Komoditas Kedelai, oleh Kelompok Tani “Sumber Tirta” Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus;
9. Juara Harapan I Lomba Mendongeng Anak Tingkat Nasional oleh Eny Kusumawati, SPd, dari TK ABA 1 Gubug;
10. Juara I Tingkat Nasional Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Cabang Atletik oleh Irfan Toni Saputra, dari SMPN 1 Karangrayung;
11. Juara II Tingkat Nasional Lomba Motivasi Belajar Mandiri oleh Risti Novitasari, Suruli Asmianti dan Siti Nurhidayah dari SMP Terbuka 2 Wirosari;
12. Penyaji Terbaik, Penata Musik Terbaik, Penyanyi Unggulan, Pencipta Lagu Unggulan, Penyaji Unggulan dan Penata Musik Unggulan serta menjadi Juara Umum dalam Parade Lagu Daerah Tingkat Nasional, serta masih banyak penghargaan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

VI. PENUTUP

Demikian paparan singkat mengenai aspek-aspek kebijakan program maupun implementasinya, baik yang menyangkut permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun pembinaan ketertiban umum dan pembinaan kemasyarakatan sesuai tugas dan wewenang kepala daerah.

Namun kami menyadari, bahwa dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat memenuhi aspirasi masyarakat, serta menyelesaikan persoalan-persoalan daerah secara menyeluruh. Hal ini bukan karena kami tidak atau kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, tetapi semata-mata karena keterbatasan sumber daya yang ada dan tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang singkat.

Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, melalui forum ini saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada semua pihak dapat memberikan

kritik, saran dan masukan yang konstruktif guna perbaikan atau peningkatan kinerja pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang. Demikian juga kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, dukungan dan kerjasamanya dengan baik selama ini.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan lahir dan bathin kepada kita semua untuk terus membangun Kabupaten Grobogan yang kita cintai ini semakin maju, mandiri, makmur dan sejahtera.

Purwodadi, 22 Maret 2012.



BUPATI GROBOGAN

H. BAMBANG PUJIONO, SH